

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin maju dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan lagi dengan adanya informasi. Informasi dibutuhkan oleh masyarakat adalah untuk mengetahui kondisi yang ada di sekitar mereka, mencerdaskan kehidupan mereka ataupun untuk memperluas pengetahuan. Masyarakat dapat memperoleh informasi dari mana saja ataupun melalui sarana apa saja, salah satunya informasi dapat diperoleh melalui media massa. Media massa terdiri dari surat kabar, televisi, radio, dan juga internet sangat terasa fungsinya dalam zaman yang global ini.

Media massa begitu berguna dan berjasa bagi kehidupan masyarakat dalam hal memperoleh informasi. Segala informasi dapat dengan mudah diakses melalui media massa. Surat kabar merupakan salah satu dari media massa yang berperan besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Terlebih surat kabar harian yang selalu terbit setiap hari. Hingga kini surat kabar masih diminati oleh sejumlah masyarakat. Hal tersebut dikarenakan surat kabar memiliki karakteristik publisitas yaitu penyebaran terhadap publik, periodesitas yaitu keteraturan terbit, universalitas yaitu isinya yang beragam dari seluruh dunia, aktualitas yaitu menyajikan berita terbaru dan terdokumentasi (Ardianto, 2004: 104-106).

Surat kabar yang memiliki peranan penting dalam memberikan informasi bagi masyarakat, selalu dituntut untuk memberikan informasi yang *up to date* dan

tentu saja benar. Karena tanggung jawab sosial yang cukup besar terhadap masyarakat, surat kabar harus selalu menyajikan isi berita yang berkualitas.

Penelitian ini memfokuskan pada konflik KPK dan POLRI terkait pengadaan simulator SIM. Pada saat itu media menduga adanya korupsi yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam pengadaan simulator SIM. Karena ini adalah kasus korupsi, maka KPK sebagai Komisi Pemberantas Korupsi segera mengambil tindakan pada kasus tersebut. Kasus tersebut sempat menjadi perebutan antara KPK dan POLRI. Setelah muncul berbagai pemberitaan di media, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan melihat kecenderungan pemberitaan dari media cetak nasional.

Majalah Tempo pada 29 April 2012 memberitakan kasus tersebut dengan judul "*Simsalabim Simulator SIM*". Kasus antara KPK dan POLRI terkait simulator SIM berawal pada kemenangan tender oleh PT Citra Mandiri Metalindo Abadi senilai Rp 168,87 miliar di Korp Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sukotjo S. Bambang melihat direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia memasukkan uang sebanyak Rp 2 miliar ke dalam dua kardus yang masing-masing berisi Rp 1 miliar. Citra Mandiri lalu mengajak Inovasi Teknologi untuk mengerjakannya. Sukotjo dan Budi. Budi adalah kongsi dagang dari PT Inovasi Teknologi Indonesia. Setelah Budi dan Sukotjo bertemu, maka anak buah dari Budi memindahkan kardus Rp 1 miliar ke mobil Budi Susanto. Kemudian kardus lain dipindahkan ke Kantor Korp Lalu Lintas Polri. Perintah tersebut mengatakan bahwa uang tersebut harus diserahkan kepada Djoko Susilo. Ketika itu Djoko

Susilo tidak ada di kantor jadi uang tersebut dititipkan kepada Tiwi, sekretaris pribadi Djoko (Sumber: Majalah Tempo edisi 29 April 2009).

Sukotjo bertemu dengan perwira menengah di Bagian Perencanaan dan Administrasi Korp Lalu Lintas. Menurut Sukotjo setoran uang ke markas Korp Lalu Lintas hanya satu aliran dari proyek simulator, puluhan miliar lain juga disetor ke perwira yang lain. Tender yang saat itu terjadi memang sudah diatur agar pemenang tender adalah Citra Mandiri. Saat itu Sukotjo ikut mempersiapkan dokumen perusahaan pesaing seperti PT Bentina Agung, PT Digo Mitra Slogan, PT Dasma Pertiwi dan PT Kolam Intan. Empat perusahaan itu hanya dipakai untuk pendamping agar tender seolah dilakukan melalui prosedur yang ada. Dalam tender, Ketua Primer Koperasi Polisi (Primkoppol) Korp Lalu Lintas Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan ditunjuk sebagai ketua tim pengadaan. Dalam tender itu, Wakil Kepala Korp Lalu Lintas Brigadir Jenderal Didik Purnomo disepakati harga simulator kemudi sepeda motor adalah Rp 77,79 juta per unit dan simulator kemudi mobil Rp 256,142 juta per unit. Harga itu kelewat mahal, sebab dalam dokumen perjanjian pembelian barang dari Citra Mandiri Metalindo dengan Inovasi Teknologi, harga per unit simulator hanya Rp 42,8 juta dan simulator kemudi mobil Rp 80 juta per unit. Jadi perusahaan milik Budi Susanto mendapat keuntungan Rp 116 miliar (Sumber: Majalah Tempo edisi 29 April 2009).

Keuntungan tersebut tidak dipakai sendiri tetapi dibagikan pada Primkoppol Korp Lalu Lintas sebanyak Rp 15 miliar. Dia juga pernah memberikan pejabat Inspektorat kepada staf pribadi Djoko Susilo. Ia juga

mencatat ada kiriman uang untuk tim inspektorat Pengawasan Umum sebesar Rp 700 juta. Kemudian Rp 1 miliar ke Inspektur Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Fajar Prihantono. Dana lain mengalir ke tim pengawasan Korp Lalu Lintas Polri. Akhirnya Korp Lalu Lintas mencairkan dana simulator sebesar Rp 54,45 miliar pada pertengahan Maret 2011 padahal saat itu kontrak 700 unit baru terkirim 100 unit (Sumber: Majalah Tempo edisi 29 April 2009).

Kasus korupsi simulator SIM yang dilakukan oleh Djoko Susilo sebagai mantan Kepala Korp Lalu Lintas mulai diusut oleh KPK sebagai lembaga pemberantas Korupsi. KPK mulai melakukan pengusutan sejak Januari 2012. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2012 KPK menetapkan Inspektur Djoko Susilo sebagai tersangka. Saat itu polisi mengaku baru memeriksa 33 saksi dan belum ada tersangka. Pada 30 Juli 2012 KPK menggeledah kantor Korp Lalu Lintas. Tetapi polisi menyandera berkas tersebut dengan alasan bahwa kasus simulator juga sedang diusut. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2012 Polisi menetapkan lima tersangka antara lain Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, Komisaris Legimo, Sukotjo S. Bambang, dan Budi Susanto. Tetapi KPK lebih dulu menetapkan nama-nama tersangka pada 27 Juli 2012 antara lain, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Sukotjo S. Bambang, dan Budi Susanto. Kemudian Polisi dan KPK mengadakan pertemuan dan membuat kesepakatan bersama pengusutan kasus simulator SIM. Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang KPK dengan tegas menyebutkan, jika KPK mulai menyidik, Kepolisian dan Kejaksaan tak berwenang lagi (Sumber: Majalah Tempo edisi 29 April 2009).

Pemberitaan yang ada di Koran Tempo cenderung memberitakan dari sisi KPK yang terlihat dari judul berita yang ditampilkan. Seperti yang dilakukan Koran Tempo pada 1 Agustus 2012 dengan judul *Jenderal Polisi Jadi Tersangka Korupsi*. Saat itu petugas KPK mendatangi kepolisian untuk mengeledah Markas Korp Lalu Lintas Mabes Polri. Mereka sempat mengalami perlawanan ketika melakukan pengeledahan. Pemeriksaan berlangsung lama karena penyitaan barang bukti yang ditemukan penyidik KPK sempat dihalang-halangi (Tempo, 1 Agustus 2012 hal 1).

Juru Bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan pengeledahan sempat berjalan empat jam. Tapi polisi menghentikan kegiatan tim KPK. Tiga pemimpin KPK, Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Busyro Muqoddas, sampai harus menemui Kepala badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Sutarman. "Setelah itu pengeledahan bisa dilanjutkan," kata Johan (Tempo, 1 Agustus 2012 hal 1).

Sedangkan pada Surat Kabar Kompas 1 Agustus 2012 dengan judul *KPK Tidak Boleh Dihambat* lebih terlihat netral dalam pemberitaannya. Kompas lebih menyajikan fakta dari beberapa sumber mengenai kasus KPK dan POLRI.

Sutarman mengungkapkan, dalam investigasi bersama itu KPK lebih fokus pada penanganan kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Bareskrim Polri lebih fokus pada pihak-pihak lain atau penyelenggara negara yang tidak ditangani KPK (Kompas, 1 Agustus 2012 hal 15).

Pada bulan September 2012 Koran Tempo menulis berita dengan lebih memfokuskan pada penarikan penyidik yang dilakukan oleh POLRI terkait simulator SIM, dapat terlihat dari pemberitaan yang dilakukan oleh media tersebut yang banyak menyebutkan bahwa penarikan tersebut dilakukan terkait perseteruan pihak KPK dan POLRI. Tetapi pihak POLRI membantah hal tersebut, pihaknya mengatakan bahwa penarikan tersebut terkait balasan pihak POLRI terkait status penyidik (Tempo, 15 September 2012).

Surat Kabar Kompas, melihat hal tersebut dari sisi yang berbeda, dari judul pemberitaan, peneliti melihatnya sebagai sesuatu yang lebih netral walaupun terkadang masih terlihat kecenderungan terhadap pihak KPK pada 10 September 2012 dengan judul *Sukotjo Berharap KPK Bukan Polri*.

POLRI juga memproses kasus ini dengan tersangka sama dengan KPK, kecuali Djoko Susilo. Membayangkan kliennya yang akan hilir mudik di dua institusi, Erick berkomentar, "Klien saya tak mungkin ada di dua institusi untuk kasus yang sama. Seharusnya POLRI serahkan kasus ini ke KPK. Ketentuan ini sudah ada di UU KPK," kata Erick (Kompas, 10 September 2012).

Peneliti masih melihat kecenderungan adanya keberpihakan media dalam konflik KPK dan POLRI. Pemberitaan yang ada di Koran Tempo terbilang cukup banyak dan sangat terlihat keberpihakannya terhadap KPK, sedangkan SKH Kompas melakukan pemberitaan yang lebih sedikit dengan judul berita yang lebih netral dengan sisi berita yang berbeda. Kasus antara dua lembaga besar tersebut tentu saja menarik untuk diteliti lebih lanjut karena pemberitaannya terbilang cukup lama. KPK yang merupakan lembaga penegak hukum bertugas memberantas korupsi di Indonesia dan POLRI sebagai lembaga badan hukum negara yang bertugas menangani hukum di Indonesia sedang terkait masalah dengan korupsi itu sendiri.

Terkait dengan penelitian ini, ada riset mengenai majalah Tempo dengan judul *Faktualitas Berita dalam Laporan Utama di Majalah Tempo (Studi Analisis Isi Faktualitas Berita Majalah Berita Mingguan Tempo periode 1 Mei-31 Juli 2010)* oleh Lucas Aditya (2011) seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menjelaskan bahwa majalah Tempo telah mampu menjaga faktualitas beritanya dalam rubrik Laporan Utama pada setiap edisinya. Satu hal yang membuat majalah Tempo sering mendapatkan

pengaduan terkait dengan pemberitannya berkaitan dengan identitas sumber berita yang tidak disebutkan dalam sebuah berita. Hal tersebut sempat diungkapkan oleh Aburizal Bakrie yang pernah mengadukan majalah Tempo berkaitan dengan kejelasan sumber berita ini. Namun jika melihat gaya penulisan investigasi yang dipilih majalah Tempo untuk menuliskan Laporan Utama, pilihan majalah Tempo untuk menyembunyikan sebuah kebijakan redaksional untuk melindungi sumber berita dan ada kaitannya dengan penerapan kode etik jurnalistik berlaku di Indonesia. Jadi dengan begitu dapat disimpulkan majalah Tempo telah mampu menjaga faktualitas beritanya (Aditya, 2011:96).

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya, dengan judul *Kasus Mafia Pajak Gayus Halomoan P Tambunan Dalam Pemberitaan Surat Kabar Harian Kompas dan Tempo (Analisis Isi Berita Kasus Mafia Pajak Gayus P Tambunan Ditinjau dari Kualitas Isi Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo Periode November 2010-Januari 2011)* oleh Maria Divina Kusma Dewi (2011), seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menjelaskan bahwa Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo memiliki dimensi *balance* yang cukup baik. Pada penelitian ini surat kabar Kompas dan koran Tempo memenuhi dimensi *neutrality* (Divina, 2011:17).

Penelitian yang lain dengan judul *Pemberitaan Studi Banding Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat ke Luar Negeri (Studi Analisis Isi Kecenderungan Sikap Media dalam Surat Kabar Harian Media Indonesia, Kompas dan Koran Tempo Periode April-Mei 2011)* oleh Lucia Eltariza Ajeng

Kumala Dewi (2011), seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menjelaskan bahwa dimensi keberimbangan Harian Media Indonesia memiliki kecenderungan yang tinggi dalam menghadirkan pemberitaan yang tidak berimbang. Harian Kompas memiliki kecenderungan media yang lebih baik dibanding Media Indonesia dan Tempo (Eltariza, 2011:12)

Penelitian selanjutnya dengan judul *Objektivitas Pemberitaan KPK dan POLRI Dalam Kasus Bibit-Chandra (Analisis Isi Berita Kasus Bibit-Chandra dalam SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat Periode 11 September - 2 Desember 2009)* oleh Rosyana Dwiuniarti (2010), seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menjelaskan bahwa hasil analisis isi objektivitas pemberitaan KPK dan POLRI dalam kasus Bibit-Chandra pada aspek *Factuality* terpenuhi pada dimensi *informativeness* dan *relevance*. Sedangkan pada aspek *impartiality* hanya terpenuhi pada dimensi *balance* saja. Pemberitaan cenderung condong memberitakan KPK secara positif berdasarkan arah pemberitaan yang lebih banyak memihak KPK (Dwiuniarti, 2010:22).

Penelitian yang dilakukan Dewan Pers menyatakan bahwa Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo menduduki peringkat pertama dan kedua yang memiliki kualitas yang baik. Peneliti melihat bahwa kedua media tersebut intens memberitakan konflik antara KPK dan Polri dalam kasus simulator SIM. Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo dipilih dengan pertimbangan bahwa keduanya memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. SKH Kompas dan Koran Tempo memiliki pangsa pasarnya sendiri. Di samping itu Koran Tempo memiliki

kedekatan yang cukup baik dengan KPK karena pemberitan Tempo bersifat investigasi maka peneliti ingin melihat ketidakberpihakan Koran Tempo terkait konflik antara KPK dan POLRI. Sedangkan Surat Kabar Harian Kompas lebih bersifat netral dalam pemberitannya. Koran Tempo pada bulan Agustus terdapat 36 berita, bulan September terdapat 21 berita, dan bulan Oktober terdapat 16 berita. Pada Koran Kompas, bulan Agustus terdapat 22 berita, bulan September terdapat 18 berita dan bulan Oktober terdapat 11 berita.

Batasan dalam penelitian ini adalah berita yang terkait simulator SIM sebelum adanya keputusan dari Presiden SBY tanggal 8 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa kasus tersebut dipegang oleh KPK. Peneliti mencoba menjelaskan kecenderungan aspek ketidakberpihakan dua media tersebut dalam konflik KPK dan Polri. Kecenderungan aspek ketidakberpihakan dibagi menjadi dua yaitu *balance* dan *neutrality* yang terlihat dari pengemasan teks berita dalam menghadirkan kualitas pemberitaan.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang ingin dijawab pada penelitian ini adalah bagaimana kecenderungan ketidakberpihakan media dalam pemberitaan konflik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) terkait kasus simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) pada Surat Kabar Kompas dan Koran Tempo periode Agustus-Oktober 2012 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kecenderungan ketidakberpihakan media dalam pemberitaan konflik KPK dan POLRI terkait

kasus simulator SIM pada Surat Kabar Kompas dan Koran Tempo periode Agustus-Oktober 2012.

D. Manfaat Penelitian

D. 1. Manfaat Akademis

Memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu komunikasi dan referensi bagi penelitian mengenai salah satu metode penelitian komunikasi yaitu analisis isi berita konflik KPK dan POLRI dalam kasus simulator SIM pada pemberitaan di Surat Kabar Kompas dan Tempo periode Agustus-Oktober 2012

D. 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan bagi pembaca dan menambah pengetahuan tentang kecenderungan aspek evaluatif media dalam pemberitaan konflik KPK dan POLRI terkait kasus simulator SIM. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk terapan ilmu komunikasi.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori digunakan untuk landasan bagi peneliti dalam mengolah data yang telah diperoleh. Selain itu, kerangka teori digunakan untuk menguatkan pemikiran sehingga kebenarannya bisa diterima oleh pihak lain. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian antara lain:

E.1 Surat Kabar

Ada beberapan fungsi dari surat kabar antara lain memberikan informasi, hiburan, wawasan serta edukasi. Bukan hanya itu, surat kabar juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Menyampaikan

informasi merupakan fungsi utama dari surat kabar. Surat kabar merupakan media yang berorientasi pada publik, sehingga dapat dibaca dan dinikmati oleh khalayak luas dan tidak terbatas pada siapa saja.

Berbagai peristiwa yang terjadi tidak semuanya layak untuk menjadi sebuah berita yang dilaporkan pada khalayak. Peristiwa yang akan menjadi berita harus mempunyai nilai berita untuk dilaporkan agar menarik minat orang untuk membacanya.

Ashadi Siregar (1998:27) menjelaskan bahwa berita dikatakan mempunyai nilai berita sebagai berikut; *significance* (penting), *magnitude* (besar), *timeliness* (waktu), *proximity* (dekat), *prominance* (tenar), *human interest* (manusiawi). *Significance* adalah suatu kejadian yang diberitakan dapat mempengaruhi kehidupan orang banyak.

Significance diartikan sebagai makna atau arti, biasanya digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh fakta atau peristiwa yang disajikan. *Magnitude* lebih diartikan sebagai besaran sebuah peristiwa, sebuah peristiwa dianggap besar jika melibatkan banyak orang. *Timeliness* adalah ketepatan waktu. *Timeliness* memiliki dua jenis aktualitas, yakni aktualitas objektif yang diukur berdasarkan pada hitungan waktu dan aktualitas subjektif yang diukur berdasarkan pada kedekatan atau hubungan peristiwa. *Proximity* adalah kedekatan. Kedekatan disini mempunyai arti kedekatan secara psikografis dan kedekatan geografis. *Proximity* psikografis diukur untuk mengukur informasi yang mempunyai kedekatan emosi dan psikologis. Sedangkan *proximity* geografis digunakan untuk mengukur informasi yang memiliki kedekatan geografis yaitu kedekatan ruang

dan jarak. *Prominance* adalah keadaan yang menonjol, berkaitan dengan orang-orang yang terkemuka (Rahayu, 2006:20-22).

Berita yang diteliti mengenai pemberitaan KPK dan POLRI dalam kasus simulator SIM adalah berita yang diulas di surat kabar. Berita merupakan salah satu produk dari surat kabar. Menurut Effendy (2003:21) Ditinjau dari ilmu komunikasi sifat surat kabar adalah sebagai berikut:

a. Terekam

Setiap peristiwa atau hal yang diberitakan terekam, sehingga dapat dibaca setiap saat dan dapat dijadikan dokumentasi serta dipakai sebagai bukti untuk keperluan tertentu.

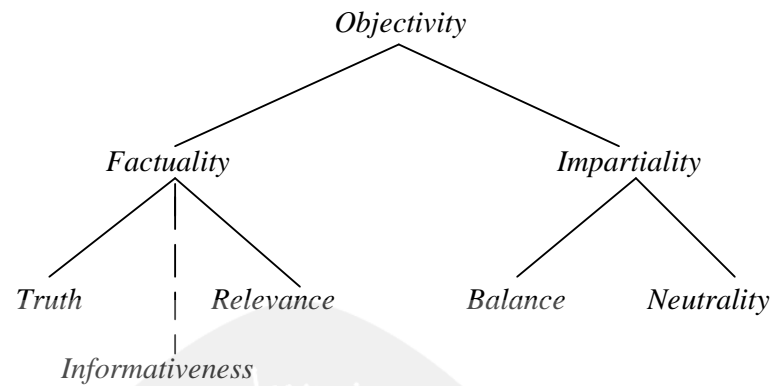
b. Menimbulkan perangkat mental serta aktif

Berita surat kabar yang dikomunikasikan kepada khalayak menggunakan bahasa dengan huruf yang tercetak mati di atas kertas, maka untuk dapat mengerti maknanya pembaca harus menggunakan perangkat mentalnya secara aktif, dan wartawan yang menyusun berita (pesan) harus menggunakan bahasa yang umum sehingga mudah dicerna.

E.2. Media Performance

McQuail mengungkapkan bahwa salah satu cara untuk melihat profesionalitas media adalah dengan mengukur objektivitas pemberitaan. Westerthal dalam buku McQuail yang berjudul *Media Performance* membaginya menjadi dua yakni aspek kognitif dan aspek evaluatif. Berikut cara kerja yang diperkenalkan oleh Westerstahl dalam melihat objektivitas:

GAMBAR 1
Komponen utama objektivitas berita (Westerstahl, 1983)



(McQuail, 1992:196)

Berdasarkan gambar 1, Westerstahl membagi objektivitas menjadi dua aspek yakni faktualitas yang merupakan aspek kognitif dan impartialitas yang merupakan aspek evaluatif.

McQuail menyatakan bahwa aspek kognitif berita sangat terkait dengan faktualitas. Faktualitas dikaitkan dengan bentuk penyajian laporan tentang peristiwa atau pernyataan yang dapat dicek kebenarannya pada sumber dan disajikan tanpa komentar (McQuail, 1992:197). Kaitannya dengan faktualitas, sebuah berita harus selalu dilakukan cek tentang kebenarannya seperti kebenaran adanya sumber yang diwawancara dan apakah peristiwa atau kejadian tersebut benar terjadi atau tidak.

Faktualitas dapat dinilai dari dua cara, yang pertama adalah kebenaran (*truth*). Kebenaran adalah reliabilitas artinya fakta yang dihimpun oleh wartawan benar-benar berangkat dari peristiwa yang telah terjadi terjadi. Kebenaran ditentukan oleh *factualness* yaitu pemisahan antara fakta dengan opini.

Selanjutnya adalah *accuracy* yaitu kecermatan dalam melihat data, angka, tempat, waktu. Kemudian *completeness* adalah kelengkapan dari data (McQuail, 1992:197).

Dalam kajian jurnalistik, kebenaran berarti berita harus bersifat faktual dan berdasarkan fakta yang ada. Mengacu pada prinsip tersebut, misalnya dalam pemberitaan KPK dan POLRI, wartawan tidak dibenarkan memberikan opini pribadinya dengan alasan apapun. Wartawan harus menyajikan fakta-fakta yang sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak ada yang dikurangi atau ditambahkan. Pencantuman nama narasumber, jabatan, tempat dan waktu kejadian berlangsung harus ditulis dengan lengkap.

Relevansi (*relevance*) mensyaratkan perlu adanya proses seleksi. Pada dasarnya relevansi sama pentingnya dengan kebenaran. Menurut McQuail (1992), berita yang mengandung aspek relevansi adalah berita yang yang memuat unsur-unsur yang saling berkaitan dengan standart kualitas isi berita dan merujuk kepada fokus berita. Sedangkan informatif (*informativeness*) berkaitan dengan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas pemahaman dan pembelajaran tentang peristiwa yang terjadi.

Sedangkan aspek evaluatif berkaitan dengan ketidakberpihakan yang sering kali menjadi ukuran kualitas sebuah berita. Ketidakberpihakan dilihat dari apakah teks berita secara sistematis menonjolkan satu sisi di atas yang lain ketika berkenaan dengan isu-isu yang kontroversial dengan tujuan mengarahkan pembaca secara konsisten ke arah tertentu (McQuail, 1992:200-201).

Penelitian ini menganalisis kecenderungan aspek imparsialitas media pada

pemberitaan konflik KPK dan POLRI. Aspek ketidakberpihakan media dapat melihat lebih efektif arah pemberitaan dari media dan dapat mengukur kualitas dari media itu sendiri.

Aspek kedua adalah evaluatif (*impartiality*) berkaitan dengan ketidakberpihakan. Dimensi evaluatif menyangkut pada hal-hal yang sifatnya lebih pada konteks fakta dan berkaitan dengan definisi jurnalisme. Melalui dimensi ini, nilai dan etika yang berasal dari masyarakat dioperasionalkan. Dalam penelitian ini, *media performance* tidak ditampilkan secara keseluruhan. Aspek informasi dapat dilihat langsung dalam sebuah berita karena tampak (*manifest*) dalam teks berita sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas berita ditentukan oleh aspek ini. Aspek informasi hanya difokuskan pada fakta. Namun penelitian kecenderungan aspek evaluatif media hanya melihat konteks fakta. Hal tersebut akan dijelaskan pada aspek evaluatif *media performance* yang terdiri dari keseimbangan (*balance*) dan netralitas (*neutrality*) pemberitaan.

E.3 Kategori Aspek *Impartiality Media Performance*

E.3.1. Keseimbangan (*balance*)

Balance diartikan dengan keseimbangan dalam pemberitaan. Keseimbangan meliputi keterlibatan semua perspektif dan pendapat yang seimbang. Kemudian dapat dilihat berapa banyak media memberikan tempat bagi salah satu pihak untuk memberikan pendapat. Dengan mengukur besarnya ruang dan waktu tersebut, dapat dilihat arah kecenderungan suatu pemberitaan.

Penelitian ini *balance* diukur berdasar pada tiga elemen. Elemen pertama adalah ada tidaknya *source bias* dapat dilihat dari ketidakseimbangan sumber

berita yang dikutip dalam peliputan. Ketidakhadiran salah satu pihak, baik pro ataupun kontra dapat menjadi aspek *balance* berkurang. Elemen kedua adalah adanya *slant* atau kecenderungan dalam pemberitaan. *Slant* dapat diukur dengan adanya penggunaan kalimat berupa kritikan atau pujian yang berasal dari media itu sendiri (wartawan, editor). Elemen ketiga adalah ketidakseimbangan porsi pemberitaan (Rahayu, 2006:22-23).

Wartawan harus mampu menjaga keseimbangan dalam proses seleksi fakta-fakta yang akan ditampilkan. Wartawan tidak berhak memberikan penilaian atas benar atau salah suatu kejadian melainkan menyajikan pendapat pro kontra tersebut apa adanya. Ketidakseimbangan porsi pemberitaan dapat dilihat dengan melihat ketidakseimbangan porsi alinea, representasi narasumber, representasi aktor dan ketidakseimbangan kuantitas data atau fakta yang dibutuhkan (Rahayu, 2006:23).

E.3.2. Netralitas (*Neutrality*)

Netralitas berarti netral, tidak memihak kepada pihak manapun. Pada dasarnya netralitas menempatkan berita pada posisi yang seimbang dan tidak melebih-lebihkan fakta. Netralitas lebih berhubungan dengan presentasi fakta itu sendiri yang dapat dievaluasi dari penggunaan kata-kata, citra, dan *frames of reference* yang bersifat evaluatif dan juga penggunaan presentasi yang berbeda. Dalam penelitian ini netralitas dapat dilihat apakah media memihak kepada salah satu pihak yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atau POLRI (Polisi Republik Indonesia).

Dimensi netralitas dalam penyajian berita adalah penempatan, keutamaan *relatif*, *headlining* dan pilihan kata. Dalam penelitian dewan pers, netralitas digunakan untuk melihat pemakaian kata-kata yang dapat menimbulkan sensasionalisme, kemudian ditambahkan pula aspek stereotipe dan dua aspek teknik penulisan berita yakni *juxtaposition* dan *linkages* (Rahayu, 2006:24).

Sensasionalisme dan emosionalisme hanya dapat menjauhkan pemberitaan dari netralitas dan objektivitas sehingga tidak dibenarkan berada dalam ruang jurnalistik. Sensasionalisme dapat diartikan sebagai sifat suka menimbulkan sensasi yang bertujuan untuk menarik perhatian orang lain. Pengukuran sensasionalisme dapat dilakukan dengan tiga indikator (Rahayu, 2006:25).

Pertama, ada tidaknya personalisasi. Personalisasi dapat diartikan sebagai pandangan yang melihat individu tertentu sebagai aktor utama atau yang paling berpengaruh dalam sebuah peristiwa.

Kedua, sensasionalisme diukur berdasarkan ada atau tidak ada emosionalisme. Emosionalisme dapat diartikan sebagai penonjolan aspek emosi (suka, sedih, gembira, marah, dan sebagainya) dibandingkan aspek logis rasional dalam penyajian sebuah berita.

Ketiga, sensasionalisme diukur berdasarkan pada ada atau tidaknya dramatisasi. Dramatisasi dapat dipahami sebagai penulisan berita yang bersifat hiperbolik dan melebih-lebihkan sebuah fakta untuk menimbulkan efek dramatis bagi pembacanya.

Stereotipe oleh Dewan Pers (Rahayu, 2006:26) diartikan sebagai "pemberian atribut tertentu terhadap individu, kelompok atau bangsa tertentu

dalam penyajian sebuah berita”. Pemberian atribut ini nantinya dapat bersifat positif atau negatif, dan akan terlihat keberpihakan media terhadap kelompok tertentu.

Jika merujuk pada Rahayu (2006:26), *juxtaposition* dapat diartikan sebagai penyandingan akan dua hal yang berbeda. Penggunaan *juxtaposition* dilakukan dengan memunculkan efek kontras sehingga akan menambah kesan dramatis berita yang disajikan. Penggunaan *juxtaposition* dapat menggeser makna yang berbeda (tidak berhubungan) menjadi sama (berhubungan). *Linkages* adalah menyandingkan dua fakta yang berbeda dengan maksud untuk menimbulkan efek asosiatif (menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain). Wartawan menggunakan *linkages* untuk menghubungkan dua fakta yang sebenarnya berbeda sehingga kedua fakta tersebut dianggap (diasosiasikan) memiliki hubungan sebab akibat (Rahayu, 2006:26).

Ada atau tidaknya sensasionalisme dapat diukur dengan indikator diatas, bila dalam pemberitaan atau penyajian berita terdapat hal tersebut maka berita dikatakan tidak netral karena melebih-lebihkan suatu peristiwa dengan maksud menarik perhatian pembaca.

F. Kerangka Konsep

TABEL 1
Unit Analisis dan Kategorisasi Penelitian

Dimensi	Unit Analisis	Kategorisasi	Sub Kategorisasi
---------	---------------	--------------	------------------

<i>Balance</i>	<i>Source bias</i>	adanya representasi satu sisi KPK dalam pemberitaan	a) Ya b) Tidak
		adanya representasi satu sisi POLRI dalam pemberitaan	a) Ya b) Tidak
	<i>Slant</i>	Ada atau tidaknya kritikan atau pujian terhadap KPK yang berasal dari media (wartawan, editor)	a) Ada b) Tidak ada
		Ada atau tidaknya kritikan atau pujian terhadap POLRI yang berasal dari media (wartawan, editor)	a) Ada b) Tidak ada
	Ketidakseimbangan porsi pemberitaan	Keseimbangan porsi alinea dalam pemberitaan antara KPK dan POLRI	a) Ada b) Tidak ada
<i>Neutrality</i>	<i>Sensationalism</i>	Penggunaan aspek personalisasi terhadap (KPK/Polri)	a) Ada b) Tidak ada
		Penggunaan aspek emosi terhadap (KPK/POLRI)	a) Ada b) Tidak ada

		Penggunaan bahasa yang dramatisasi terhadap (KPK/POLRI)	a) Ada b) Tidak ada
	Stereotipe	Pemberian atribut tertentu terhadap individu, kelompok atau bahasa tertentu dalam penyajian sebuah berita terkait	a) Ada b) Tidak ada
	<i>Juxtaposition</i>	Penyandingan dua hal yang tidak berhubungan menjadi berhubungan secara kontras	a) Ada b) Tidak ada
	<i>Linkage</i>	Penyandingan dua fakta yang berbeda sehingga dianggap memiliki hubungan sebab akibat	a) Ada b) Tidak ada

Sumber: olah data data dari penelitian sebelumnya

G. Definisi Konsep

Kecenderungan aspek imparialitas media baik pro, kontra, atau netral Tdalam konflik antara KPK dan POLRI terlihat dari teks berita masing-masing media. Alat ukur yang digunakan adalah objektivitas pemberitaan yang diperkenalkan oleh Westerstahl yang juga menjadi bagian dari penelitian Dewan Pers dalam memberikan penilaian atas kualitas pemberitaan media cetak di pulau Jawa. Penelitian ini melihat kecenderungan aspek imparialitas media dilihat dari

keseimbangan dan netralitas pemberitaan terkait berita KPK dan POLRI terkait pengadaan simulator SIM.

H. Definisi Operasional

Berdasarkan dimensi keseimbangan dan netralitas dalam kerangka teori maka dapat dibentuk definisi operasional. Berita-berita yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan unit analisis yang disesuaikan kategori aspek evaluatif *media performance*.

H.1. Keseimbangan (*Balance*)

Balance sering diartikan sebagai keseimbangan dalam pemberitaan. *Balance* dibedakan menjadi dua, *external balance* yaitu melihat keseimbangan di beberapa item berita dalam satu jenis media dan *internal balance* yaitu melihat keseimbangan berdasarkan teks. Dalam analisis isi, *balance* dapat diukur berdasarkan ruang, waktu dan penyajian pendapat dari salah satu pihak.

H.1.1 Ada tidaknya *source bias*

Dilihat dari ketidakseimbangan pemberitaan sumber berita dalam pemberitaan KPK dan POLRI terkait kasus simulator SIM di Surat Kabar Kompas dan Koran Tempo pada periode 1 Agustus 2012 hingga 9 Oktober 2012. Ketidakseimbangan sumber berita dapat terlihat adanya pemberitaan satu sisi yang membuat *balance* menjadi rendah. *Source bias* ditemukan apabila teks berita hanya menonjolkan satu sisi peliputan atau beberapa pihak dengan pendapat atau pandangan yang serupa. Dalam penyajiannya media harus menyajikan berita yang relevan baik pro kontra atau netral.

H.1.2 Ada tidaknya *Slant*

Dilihat dari ada tidaknya kritikan atau pujian yang ditemui dalam teks berita yang disajikan oleh surat kabar Kompas dan Koran Tempo periode 1 Agustus 2012 hingga 9 Oktober 2012. Semakin banyak pujian atau kritikan yang berasal dari media (wartawan, editor) maka unsur *balance* semakin rendah. Kritikan dan pujian yang berasal dari media terselip seakan-akan berasal dari narasumber. Misalnya kritikan atau pujian media terkait cara kerja POLRI selama ini dalam memberantas korupsi.

H.1.3 Ketidakseimbangan representasi pro-kontra pemberitaan

Ketidakseimbangan pro kontra dapat dilihat dari ada atau tidaknya keseimbangan pemberitaan porsi alinea, representasi narasumber, representasi aktor, pemakaian kata atau kalimat yang dilebih-lebihkan dan tidak sesuai dengan porsi pemberitaan. Semakin banyak penggunaan unsur diatas maka tingkat ketidakseimbangan akan semakin tinggi. Misalnya alinea pemberitaan didominasi oleh penyelidikan KPK tanpa menghadirkan sanggahan dalam porsi yang sama.

H.2. Netralitas (*Neutrality*)

Netralitas sering disamakan dengan ketidakberpihakan dalam pemberitaan. Bedanya, netralitas lebih berkaitan dengan dengan aspek presentasi suatu berita. Dalam penelitian ini, netralitas dilihat dalam adanya sensasionalisme dan emosionalisme ditambahkan juga aspek stereotipe dan dua aspek teknik penulisan berita yaitu *juxtaposition* dan *linkages*.

H.2.1. Ada tidaknya *sensationalism*, merupakan sifat suka menimbulkan sensasi. Tujuan sensasionalisme adalah menarik perhatian orang lain. Untuk mengukur sensasionalisme ada beberapa indikator antara lain:

a) Ada tidaknya personalisasi

Pemberitaan Surat kabar Kompas dan Koran Tempo menyajikan berita dengan ada atau tidak ada personalisasi (pandangan yang mereduksi peristiwa pada individu). Artinya ada pandangan atau pemikiran dari diri wartawan terkait peristiwa atau individu. Misalnya penonjolan sosok mantan kepala Korp lalu lintas dan komentarnya yang mendominasi alinea

b) Ada tidaknya penonjolan emosi

Pemberitaan Surat Kabar Kompas dan Koran Tempo, penyajian berita ada atau tidak ada emosionalisme (penonjolan aspek emosi, suka, benci, sedih, gembira) atau opini peneliti yang berpengaruh pada sikap media. Semakin tinggi penggunaan unsur tersebut maka aspek sensasionalisme semakin tinggi dan *neutrality* semakin rendah.

c) Ada tidaknya dramatisasi

Pemberitaan Surat Kabar Kompas dan Koran Tempo menyajikan ada atau tidak ada dramatisasi (penyajian berita yang bersifat hiperbolik dan melebih-lebihkan fakta dengan maksud menimbulkan efek dramatis terhadap pembacanya). Semakin banyak penggunaan unsur dramatis maka aspek sensasionalisme semakin tinggi dan *neutrality* semakin rendah. Misalkan dalam pemilihan kata dalam judul “*Polisi Dinilai Pertontonkan Pembangkangan Hukum*”.

H.2.2. Ada tidaknya stereotipe

Stereotipe dalam pemberitaan surat kabar Kompas dan Koran Tempo apabila harian tersebut memberikan banyak atribut tertentu terhadap individu,

kelompok atau bangsa tertentu dalam penyajian sebuah berita. Semakin tinggi penggunaan atribut tersebut maka semakin tinggi aspek stereotipe sehingga unsur *neutrality* semakin rendah. Misalkan saja pada kalimat *KPK seharusnya tidak bersikap arogan*.

H.2.3. Ada tidaknya *Juxtaposition*

Juxtaposition dalam pemberitaan Surat Kabar Kompas dan Koran Tempo, apakah berita tersebut menyajikan berita yang dapat menggeser pemaknaan dua kata yang sebenarnya berbeda (tidak berhubungan) menjadi sama (hubungan) secara kontras yang akhirnya menambah kesan dramatis berita yang disajikan. Semakin tinggi aspek *Juxtaposition*, maka aspek *neutrality* akan semakin rendah. Misalnya saja ditampilkannya data kasus yang tidak terselesaikan oleh pihak POLRI.

H.2.4. Ada tidaknya *Linkage*.

Linkage melihat apakah dalam pemberitaannya surat kabar Kompas dan koran Tempo menyandingkan dua fakta yang berlainan dengan maksud untuk menimbulkan efek asosiatif dan menghubungkan dua fakta yang sebenarnya berbeda sehingga kedua fakta tersebut dianggap (diasosiasikan) memiliki hubungan sebab akibat. Semakin tinggi pengaruh *linkage* maka unsur *neutrality* semakin rendah.

I. Metodologi Penelitian

1. Teknik Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi. Klaus Krippendorff dalam buku Eriyanto (2011:15) mengatakan “analisis isi kuantitatif adalah suatu

teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi (ditiru) dan sah datanya dengan memperhatikan konteksnya”.

Ciri penting dalam analisis isi antara lain (Eriyanto, 2011:16-30):

a) Objektif

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi secara apa adanya, tanpa adanya campur tangan dari peneliti. Penelitian menghilangkan bias, keberpihakan atau kecenderungan tertentu dari pihak peneliti. Ada dua aspek yang penting dari objektivitas yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas berkaitan dengan apakah analisis isi mengukur apa yang benar-benar ingin diukur. Sementara reliabilitas berkaitan dengan apakah analisis itu akan menghasilkan temuan yang sama meskipun dilakukan dengan orang yang berbeda dengan waktu yang berbeda.

b) Sistematis

Sistematis ini bermakna semua tahapan dan proses penelitian telah dirumuskan secara jelas, dan sistematis

c) Replikabel

Penelitian dengan temuan tertentu dapat diulang dengan menghasilkan temuan yang sama. Hasil dari analisis isi dengan menggunakan bahan dan teknik yang sama harus menghasilkan temuan yang sama. Temuan yang sama ini berlaku untuk waktu yang berbeda, peneliti yang berbeda dan konteks yang berbeda.

d) Isi yang tampak (*Manifest*)

Pada saat proses *coding* dan pengumpulan data peneliti hanya dapat menilai aspek-aspek dari isi yang terlihat. Sementara pada saat tahap analisis data,

peneliti dapat memasukkan penafsiran akan aspek-aspek dari sisi yang tidak terlihat.

e) Perangkuman

Analisis isi dibuat untuk membuat gambaran umum karakteristik dari suatu isi atau pesan.

f) Generalisasi

Analisis isi tidak hanya bertujuan untuk perangkuman tetapi juga untuk berpretensi untuk melakukan generalisasi.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian analisis isi adalah pemberitaan tentang kasus antara KPK dan POLRI terkait simulator SIM pada koran Tempo dan Kompas. Berdasarkan penelitian dari dewan pers, Tempo dan Kompas adalah surat kabar terbaik saat ini dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Kemudian pada tahun 2001, muncul harian pagi yaitu Tempo yang menarik perhatian pembaca. Dilihat dari pemberitaannya Tempo lebih bersifat investigasi dan mengungkapkan kasus dengan lengkap serta mendalam. Dengan alasan inilah peneliti memilih Tempo dan Kompas sebagai objek penelitian.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh berita mengenai KPK dan POLRI terkait kasus simulator SIM pada bulan Agustus 2012-Oktober 2012. Sampel penelitian dalam penelitian ini hanya mengenai kasus simulator SIM pada bulan 1 Agustus 2012 - 9 Oktober 2012 sebelum pidato dari presiden SBY terkait kasus tersebut pada 8 Oktober 2012 dan kasus tersebut diserahkan kepada KPK.

Pemilihan tersebut dikarenakan pada tanggal tersebut pemberitaan mengenai KPK dengan POLRI terbilang cukup banyak dan pada tanggal 30 Juli 2012 KPK mulai berani untuk datang ke POLRI mencari berkas yang terkait kasus tersebut. Sedangkan pada tanggal 1 Agustus 2012 POLRI menetapkan tersangka.

Peneliti mengambil semua berita pada bulan Agustus 2012-Oktober 2012 terkumpul 124 berita. Pada bulan Agustus terdiri dari 22 item berita Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo terdapat 36 item. Pada bulan September terdiri dari 18 item berita Surat Kabar Harian Kompas dan 21 item berita Koran Tempo. Pada bulan oktober terdiri dari 11 item berita Surat Kabar Harian Kompas dan 16 item berita Koran Tempo.

TABEL 2
Populasi dan Sampel Penelitian
Pada Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo

Surat Kabar	Agustus	September	Oktober
SKH Kompas	22	18	11
Koran Tempo	36	21	16
Total		124	

Sumber: hasil olah data Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data dapat membantu penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang optimal. Berikut ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti:

a. Data *intercoder* atau *coding sheet*

Beris daftar pertanyaan yang dibuat berdasarkan indikator-indikator atau kategorisasi dari variabel penelitian yang harus direspon oleh *intercoder*. Kategorisasi diturunkan dari unit analisis yang didapatkan dari kategori aspek evaluatif *media performance* seperti *balance* dan *neutrality*.

b. Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini, yaitu berupa sampel berita dari Koran Tempo dan SKH Kompas. Kliping berita diperoleh peneliti dari Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

c. Studi Pustaka

Data diperoleh dari sejumlah literatur buku, harian, surat kabar, skripsi dari sejumlah mahasiswa bidang jurnalistik Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta website ketiga media.

5. Pengkodean

Peneliti dibantu oleh dua orang *intercoder* yang memiliki kesamaan latar belakang ilmu komunikasi.

6. Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan agar memperoleh hasil yang diperoleh objektif dan reliabel. Uji reliabilitas memunculkan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Teknik uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan jawaban *coding sheet* antara satu pengkoder dengan pengkoder lainnya terhadap suatu teks berita. Maka dalam penelitian dengan menggunakan metode analisis isi, diperlukan dua pengkodean lain selain peneliti, sehingga isi pesan yang diteliti betul-betul memiliki makna yang sesuai

dengan yang dimaksudkan peneliti. Antara peneliti dan pengkoding 1, serta peneliti dengan pengkoding 2 melakukan pengkodingan untuk tiap-tiap unit analisis tidak perlu melakukan uji reliabilitas pada keseluruhan berita, cukup dengan menggunakan sampel berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo.

Pengkoding perlu memiliki pengalaman yang relatif sesuai dengan problematika penelitian yang diangkat. Sehingga pengkoding dapat diambil dari orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan topik yang diteliti, sehingga mengetahui latar belakang dan isi permasalahan (Putranto dalam Birowo, 2004:155). Perbandingan antara pengkoding dihitung dengan menggunakan rumus hitung yang dapat mengidentifikasi koefisien reliabilitas.

Metode uji Reliabilitas dengan rumus formula Oleh Holsti yaitu:

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

M = Jumlah pernyataan yang disetujui oleh pengkode

N1/N2 = Jumlah pernyataan yang dikode oleh kedua pengkode

Ambang penerimaan uji reliabilitas adalah 0,6

7. . Uji Beda

Langkah selanjutnya adalah membuat uji beda dari unit analisis SKH Kompas dan Koran Tempo. Uji beda dilakukan untuk mengetahui perbedaan signifikan antara kedua media tersebut. Uji beda yang digunakan adalah Uji T Sampel Independen.

Prosedur ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata (*mean*) antara dua populasi dengan melihat rata-rata dua sampelnya. Sampel pada uji ini adalah sampel independen (bebas), yang berarti tidak ada hubungan antara dua sampel yang akan diuji atau diartikan sebagai sampel yang didapatkan dari data yang berasal dari subjek yang berbeda (Wahana, 2009:23)

8. Analisis Data

Setelah melakukan uji beda, kemudian data diolah yaitu dengan mencatat frekuensi kemunculan unit analisis yang telah ditetapkan dalam kerangka teori melalui lembar koding yang akan disusun melalui tabel untuk membantu peneliti.

